

**EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014 – 2019**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

**NAMA : MARDIANTONI
NPM : 160411065**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2014 – 2019

NAMA : MARDIANTONI

NPM : 160411065

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

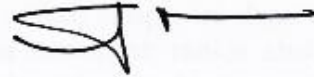
Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



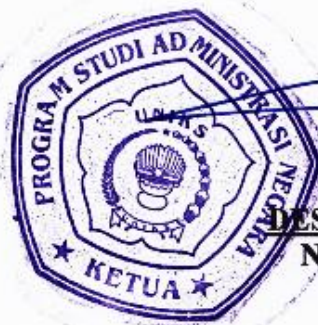
ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1005108901



SAHRI MUHAHARRAM, S.Sos, M.Si
NIDN.1021117906

Mengetahui

**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi**



DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mardiantoni
NPM : 160411065
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Teluk Kuantan, 12 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



Mardiantoni
NPM. 160411065

MOTTO HIDUP

“SAAT BERHENTI BELAJAR, ANDA BERHENTI BERTUMBUH..”

“..Setiap Hari Dalam Keadaan Apapun, Tetaplah Belajar Untuk Terus Berkembang..”

“..Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermamfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon..”

“..MELAKUKAN YANG SULIT..”

“..Mengerjakan Sesuatu Yang Sulit Itu Baik Bagi Kita. Jika Mengerjakan Sesuatu Yang Telah Kita Kuasai, Kita Tidak Akan Pernah Berkembang”

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karaya kecil ini untuk Alm. Umar Juli dan Ibunda Yurnailis serta Abang Sabrianto. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku. semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin.

ABSTRAK

Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019

MARDIANTONI
NPM. 160411065

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD menggunakan teknik *Sampling* jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 17 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan memang kurang maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang menghasilkan nilai rata-rata 117 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kata kunci : Evaluasi, Tugas Dan Fungsi BPD

ABSTRACT

Evaluation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, 2014 - 2019 Period

MARDIANTONI
NPM. 160411065

This research was conducted in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the implementation of the tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD) in organizing village governance in the Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how the implementation of the tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out village governance in the Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials and BPD uses the saturation sampling technique, where all the population is sampled, totaling 17 people, and for the community using a random sampling technique, ie taking sample members from the population is done randomly without regard to the strata in that population. Which the number of samples for elements of society amounted to 43 people. Analysis of the data used is quantitative descriptive, which is analyzing data obtained from the results of questionnaires, then processed, and then the authors draw conclusions from the results of data processing. The results showed that the performance of the Jaya Kopah Village Consultative Body did not carry out its Duties and Functions which produced an average score of 117, which meant that it was at an Intermediate Interval. As well as field observations that indicate that the Village Consultative Body is not good enough in carrying out Discussing and agreeing on Village Regulation Draft with the Village Head, Accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and Monitoring the performance of the Village Head.

Keywords : Evaluation, Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014 – 2019.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muharram, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Teristimewa Orang Tua Penulis Ayahanda Alm. Umar Juli dan Ibunda Yurnailis serta Abang Sabrianto yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Aminn ya Robal 'Alamin.

Teluk Kuantan, 12 Maret 2020

MARDIANTONI
NPM. 160411065

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Aspek Teoritis.....	8
1.4.2 Aspek Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian pustaka	10
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori/ Konsep Prilaku Organisasi.....	14
2.1.3 Teori / Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	21
2.1.4 Teori / Konsep Evaluasi.....	30
2.1.5 Teori / Konsep Pemerintahan Desa	33
2.1.6 Teori / Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	34
2.1.7 Konsep Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	37
2.2 Kerangka Pemikiran.....	40
2.3 Hipotesis.....	40
2.4 Defenisi Operasional	41
2.5 Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian	41

2.6 Teknik Pengukuran	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.2.1 Populasi.....	44
3.2.2 Sampel	45
3.3 Sumber Data Penelitian.....	46
3.3.1 Data primer	46
3.3.2 Data sekunder	47
3.4 Lokasi Penelitian.....	47
3.5 Metode Pengumpulan data.....	47
3.6 Metode Analisis Data.....	48
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1. Gambaran Umum Desa Lubuk Terentang	51
4.2. Demografi.....	51
4.2.1 Batas Wilayah Desa	51
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah	52
4.2.3 Penduduk	52
4.2.4 Lembaga Pendidikan.....	53
4.2.5 Keagamaan.....	54
4.2.6 Struktur Organisasi Desa	55
4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Identitas Responden	63
5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	65
5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	81

BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel :

Halaman :

1.1 :	Jumlah Penduduk Desa Jaya Kopah Setiap Dusun pada Tahun 2019	7
2.1 :	Operational Variabel Tentang Evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	41
3.1	Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	45
3.2	Jadwal Penelitian Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
4.1	Dusun yang ada di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	51
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	52
4.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
4.4	Jumlah Sarana Pendidikan didesa Jaya Kopah	53
4.5	Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jaya Kopah	54
4.6	Jumlah Rumah Ibadah Didesa Jaya Kopah.....	54
5.1	Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin	63
5.2	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	64
5.3	Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan.....	64
5.4	Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	65
5.5	Tanggapan Responden tentang BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.....	66
5.6	Tanggapan Responden mengenai Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah.....	68
5.7	Tanggapan Responden mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan	69

5.8	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa	70
5.9	Tanggapan responden mengenai Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah	73
5.10	Tanggapan Responden mengenai Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah	74
5.11	Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah	76
5.12	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	77
5.13	Tanggapan Responden tentang BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah	79
5.14	Tanggapan Responden mengenai BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa	80
5.15	Tanggapan Responden mengenai Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah	81
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	83
5.17	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator .	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Halaman :

2.1	Kerangka Pikir Evaluasi Tugas BPD di Desa Jaya Kopah	40
4.1	Struktur Organisasi Kantor Jaya Kopah Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	56

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman :

Lampiran 1 : Hasil Kuesioner	115
Lampiran 2 : Surat Pelaksanaan Penelitian Riset	124
Lampiran 3 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Riset	125
Lampiran 4 : Dokumentasi	126
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi	129
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah cukup luas sehingga dibagi dalam beberapa daerah untuk kemudian di berikan hak dan wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah masing-masing oleh pimpinannya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Sebagai negara yang begitu besar, Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan bersama tersebut, setiap manusia perlu bernegara, karena Negara adalah wadah suatu organisasi masyarakat dan menyiapkan alat yang akan dipegunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tiap-tiap Negara mempunyai tujuan yang di ungkapkan Kristian (2003 : 13) bahwasanya tujuan Negara bermacam-macam, antara lain untuk memperluas kekuasaan semata-mata untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari hal tersebut diatas, dalam mewujudkan tujuan negara melalui sistem pemerintahan yang baik, maka harus dibarengi administrasi yang baik pula.

Menurut Pasolong (2016:3), Administrasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Menurut Manullang (dalam zulkifli 2015) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Diperlukannya administrasi dalam rangka mencapai tujuan Negara karena dalam administrasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (organisasi)
3. *Staffing* (tenaga kerja)
4. *Directing* (pengarahan atau bimbingan)
5. *Coordinating* (koordinasi)
6. *Reporting* (pelaporan)
7. *Budgeting* (keuangan)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang, dan daerah kabupaten tersebut dibagi lagi menjadi Desa atau Kelurahan.

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang telah dibagi dalam beberapa wilayah yang di sebut otonomi daerah maka dengan itu Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh berbagai lembaga salah satunya adalah untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

Klasifikasi urusan pemerintahan mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan landasan, seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (9) Ayat (3) yang berbunyi urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Itulah tadi beberapa Regulasi turunan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang paling berkaitan dengan desa dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik

sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam ranah politik dan sosial desa, Serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan

penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam ranah politik dan sosial desa.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Jaya Kopah harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai aspirasi Masyarakat.

Desa Jaya merupakan salah satu dari 23 desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, yang terletak $\pm$ 8 Km dari pusat kota Kabupaten kearah Timur dari Kota Kecamatan. Desa Jaya Kopah mempunyai jumlah Penduduk 1567 jiwa yang terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun Linjuang, Murbai, dan bukit Termenung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Desa Jaya Kopah Setiap Dusun pada Tahun 2019.

Dusun	KK	Penduduk
Linjuang	132	489
Murbai	170	612
Bukit Termenung	130	466
Jumlah	432	1567

Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah 2019

Begitu banyak penduduk Desa Jaya Kopah Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah perannya masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan :

1. Kurang berperan BPD Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada BPD yaitu masih kurang baiknya jalan di desa Jaya Kopah yaitu di dusun linjuang dan dusun murbai, ditambah lagi ketika hujan air masih menggenangi perkarangan di depan rumah penduduk yaitu di dusun bukit termenung karena keadaan selokan (*drainase*) yang belum di buat dan juga aspirasi masyarakat yaitu pembuatan gorong-gorong (*box culvert*) karena sulitnya air mengalir karena terhambat jalan. Aspirasi tersebut disampaikan kepada BPD.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Jaya Kopah dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan., bahkan Sebagian masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya langsung ke Pemerintah Desa, sementara

BPD disini berfungsi sebagai wakil masyarakat untuk tempat menyampaikan aspirasi.

Adapun jadwal rapat yang dilakukan oleh BPD dengan masyarakat yaitu sekali dalam 2 bulan. Dari keterangan diatas, peneliti membuat kesimpulan awal bahwa Peran BPD di Desa Jaya Kopah belum dilaksanakan dengan baik atau ada faktor lain menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa di desa Jaya Kopah belum berjalan secarabaik ataumaksimal. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019 ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: “Bagaimana Evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019”.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Evaluasi tugas

dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing.

1.4.2.3 Untuk Menyelesaikan tugas Akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Teori / Konsep Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. (dalam Ayub, 2007 : 30)

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. (Nawawi, 2009 : 33),

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2001 : 14)

Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. (Siagian, 2000 : 674)

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut Dwight Waldo mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. (dalam Syafii, 2003 : 33)

Sesuai dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh George J. Gordon bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. (dalam Syafii, 2003 : 33)

Menurut Edward H. Lichfield bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. (dalam Syafii, 2003 : 33)

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (dalam syafii, 2003 : 31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha, (2008 : 36 - 38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*Top Management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21), administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*Planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*Organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*Controlling*).

2.1.2 Teori Prilaku Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :
“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.
(Silalahi 2011 : 124).

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan

sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.

2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :
(Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus

dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-

langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2011 : 132)

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Menurut Gordon ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup populer dan selama ini dipegunakan dalam organisasi publik, yaitu (dalam Siswanto, 2007 : 90):

- a. Lini, Bentuk lini merupakan struktur yang paling sederhana. Lini ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertical antara setiap tingkatan organisasi. Semua anggota organisasi menerima perintah melalui prinsip scalar. Struktur kewenangan dalam bentuk ini sangat jelas dan dikembangkan dalam organisasi yang memiliki ruang lingkup kecil.

Sistem pembagian perintah dari pucuk pimpinan kepada bawahan menyangkut seluruh kegiatan operasional dan kegiatan penunjang, sehingga semua struktur di bawah manajer terlibat dalam kegiatan.

- b. Lini dan Staf, Bentuk lini dan staf menghasilkan konstruksi struktur yang agak berbeda dengan yang pertama karena adanya tambahan staf. Staf hanya merupakan fasilitator, dan membantu tugas pimpinan seperti memberikan masukan, nasihat, membantu pengawasan. Akan tetapi, staf tidak memiliki otoritas dan hubungan langsung kepada bawahan. Staf diangkat berdasarkan keahlian yang dimiliki.
- c. Matrix, Bentuk matrix adalah bentuk organisasi proyek. Bentuk ini merupakan kombinasi sumber daya manusia dan non manusia yang diolah bersama-sama dan bersifat sementara, dan dibuat untuk tujuan.

2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010 : 2)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).

3. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07).

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena

mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefenisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan

alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler *et. al.*, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

1. Memperbaiki tingkat produktivitas
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. (dalam Sutrisno, 2009 : 7).

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi organisasi sangat penting karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Penggorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata.
3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat kedalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.
5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak

pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Salam, 2007 : 16)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam

menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi

2.1.4 Teori / Konsep Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran John M. Echols dan Hasan Shadily, (1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan (Syafii, 2003 : 33).

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Viviane dan Gilbert de Lansheere (1984) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. (Syafii, 2003 : 33)

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pebelajar (*learner*) telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai.

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian. (Syafii, 2003 : 33)

Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang walau misalnya definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering kali melakukan pengukuran. Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes. Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Penilaian bersifat kualitatif. (Syafii, 2003 : 33)

Agar lebih jelas perbedaannya maka perlu dispesifikasi lagi untuk pengertian masing-masing:

- a. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria-judgment atau tindakan dalam pembelajaran.
- b. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.
- c. Pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi, (1995 : 21) adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris.

Menurut Nugroho terdapat enam kriteria utama Evaluasi, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Perataan (*Equity*), yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. *Kelayakan (Appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. (Nugroho, 2017 : 287)

2.1.5 Teori / Konsep Pemerintahan Desa

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang manasacara stuktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu Negara.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak.

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksistensinya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Sistem pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusannya yang merupakan staf membantu kepala desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintah desa.

2.1.6 Teori / Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa : Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya Kepada Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;

- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

2.1.7 Konsep Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislatif desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah

desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Marsawa pada khususnya diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun Tata Tertib BPD.
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

2.2. Kerangka Pikir

Adapun variable dalam penelitian ini yaitu “Kinerja BPD”. Dan kerangka pikir dalam penelitian ini bisa dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Tugas BPD di Desa Jaya Kopah



Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum mampu melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik.

2.4. Operasional Variabel

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk memudahkan menganalisa penelitian ini, menggunakan konsep berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati peancangan peraturan Desa bersana Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa

2.5. Konsep Variabel, Indikator dan Item Penilaian

Tabel 2.1 : Operational Variabel Tentang Evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturandes bersama kepala Desa	1. BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa 2. Koordinasi BPD dengan aparat Desa 3. Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat 2. Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat 3. Aspirasi yang dijadikan Perdesseuai dengan keinginan masyarakat	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	3. Melakukan pengawasan	1. BPD melaksanakan pengawasan kinerja	Sangat Baik Baik

	kinerja kepala Desa	2. Kepala Desa BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa 3. Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.	Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
--	----------------------------	--	---

2.6. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelayanan dan item pertanyaan indikator dalam penelitian ini dikualifikasikan dalam 5 (Lima) kategori yaitu : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik. Untuk mengarahkan analisis data uraian masing-masing pengukuran tersebut dapat dinilai yaitu :

Sangat Baik = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 241 - 300.

Baik = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 181 - 240.

Cukup Baik = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 121 - 180.

Kurang Baik = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 61 - 120.

Tidak Baik = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 00 - 60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif yaitu membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Syafii, 2003 : 33)

Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran yang kokoh dengan menggunakan rumus matematis. (Sugiyono, 2017 : 8)

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012:13).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012 : 119)

Populasi yang penulis jadikan obyek penelitian ini adalah Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BPD Desa Jaya Kopah

sebanyak 5 orang, Perangkat Desa Jaya 12 orang dan Masyarakat Desa Jaya Kopah 1.551 orang.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2012 : 91). Penarikan sampel untuk unsur Perangkat desa menggunakan metode sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013 : 96), Menggunakan metode sampling jenuh karena jumlahnya relatif kecil yang berjumlah 12 orang dan anggota BPD 5 orang.

Untuk unsur masyarakat menggunakan metode *Random Sampling*, *Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017 : 93)

Pengambilan jumlah sampel dari masyarakat dengan menggunakan teknik slovin dan pengambilan sampel dari aparat desa dan anggota BPD Desa Jaya Kopah dengan menggunakan teknik sensus, yang keseluruhan populasi dijadikan sampel. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel penelitian dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Aparat Desa	12	12	100%
2	Anggota BPD	5	5	100%
3	Masyarakat	1.551	43	2,8%
Jumlah		1.567	60	100%

Jadi, untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel
 N : Populasi
 E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1551}{1 + 1551 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{1551}{1 + 34,89}$$

$$n = \frac{1551}{35,89}$$

$$n = 43,21 = 43 \text{ Responden (digenapkan)}$$

Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi penduduk Desa Jaya Kopah adalah sebanyak 43 orang dan jumlah sampel dari aparat Desa Jaya Kopah 12 orang, dan Anggota BPD sebanyak 5 orang, jadi total responden keseluruhannya 60 orang.

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Responden merujuk kepada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

3.3.2 Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi – instansi terkait dalam penelitian ini.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang tugas dan fungsi BPD Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. (Sugiono, 2017 : 162)

3.5.2. Observasi

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. (Gunawan, 2015 : 143)

3.5.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

(Sugiyono, 2009:240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

3.6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasrakna skala likert berikut ini :

SB = Sangat baik diberi skor 5

B = Baik diberi skor 4

CB = Cukup Baik diberi skor 3

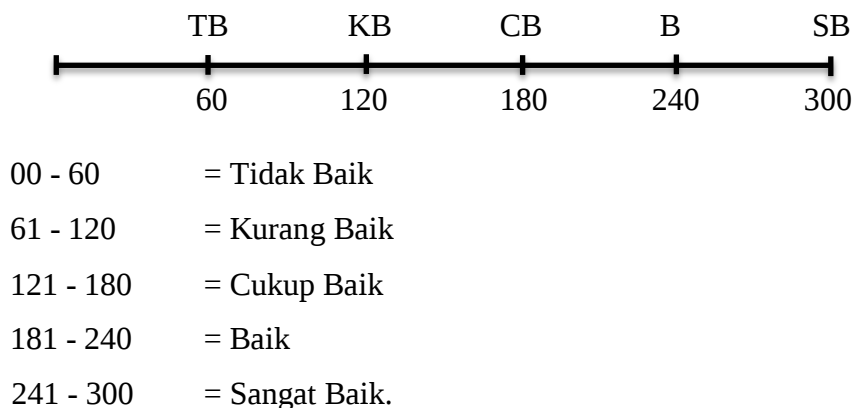
KB = Kurang Baik diberi skor 2

TB = Tidak Baik diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Total = Jawaban Responden x Skor

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.7. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tentang Evaluasi Tugas dan Fungsi BPD Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014–2020, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Oktober				November				Desember - Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x															
2	Pembuatan Proposal		x	x													
3	Bimbingan Proposal				x	x	x										
4	Ujian Proposal							x									
5	Revisi Proposal								x								

Lanjutan tabel 3. 2

6	Penelitian									x	x	x								
7	Bimbingan Skripsi											x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Ujian Skripsi																		x	
9	Revisi Skripsi																			x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Jaya Kopah

Desa JAYA adalah salah satu desa dari 6 desa di kenegerian Kopah. Pemekaran desa JAYA Pada tahun 1982, desa JAYA merupakan desa interline dan desa pertumbuhan yang wilayah luas di 6 desa kenegerian kopah dan penduduk terbanyak dibandingkan dengan desa yang ada di wilayah kecamatan Kuantan Tengah.

Desa JAYA dalam kepemimpinan dan panutan masyarakat pada 2 periode di pimpin oleh Syamsuman (Alm), dilanjutkan melalui pemilihan oleh rakyat terpilih Nursaman masa bakti 6 tahun, kemudian periode selanjutnya di pimpin oleh Amir Usman (Alm) selama 8 tahun, Pada tahun 2006 s/d 2012 di pimpin oleh Erdison dan sekretaris desa Rahman Ali, dan saat ini dipimpin oleh SETIADI YENDRA dengan Sekretaris desa YANTO. Pada tahun 2007 desa JAYA terpilih sebagai peringkat ke II desa terbaik Se-Kuantan Singingi (SK bupati)

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Jaya Kopah juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	RW	RT
1	Dusun Murbai	1	4
2	Dusun Linjuang	1	4
3	Dusun Bukit Termenung	1	4
Jumlah		3	12

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 2020

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Jaya Kopah merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Tengah, berbatasan dengan desa :

1. Sebelah Utara : Desa Munsalo Kopah
2. Sebelah Selatan : Desa Titian Modang Kopah
3. Sebelah Timur : Desa Titian Modang Kopah
4. Sebelah Barat : Desa Kopah

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Jaya Kopah adalah $\pm$ 109 Ha. Yang terdiri dari Pemukiman, Perikanan, Perkantoran, Sekolah, Jalan, lainnya.

Jarak Desa Jaya Kopah dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 5 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 1 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 5 Menit

4.2.3 Penduduk

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1.567 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 765 orang dan Perempuan 804 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	765	48,7%
2	Perempuan	804	51,3%
Jumlah		1.567	100%

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 765 orang dengan persentase 48,7% sedangkan jumlah perempuan 804 orang dengan persentase 51,3%.

Kemudian dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Jaya Kopah berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	Pra sekolah	252	16%
2	SD/M1	458	29%
3	SLTP/MTs	349	22%
4	SLTA/MA	302	19%
5	S1/Diploma	102	7%
6	Putus Sekolah	104	7%

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 202

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jaya Kopah yang terbanyak adalah tamatan SLTP/MTs.

4.2.4 Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran Lembaga pendidikan masyarakat Jaya Kopah dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan didesa Jaya Kopah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	SD/MI	1
3	SMP/ sederajat	1
4	SMA/ sederajat	-
Jumlah		3

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat desa Jaya Kopah cukup memadai.

4.2.5 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Beringin Taluk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jaya Kopah

AGAMA	Jumlah	Persentase
Islam	1567 Orang	100%
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Jaya Kopah mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Jaya Kopah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Jaya Kopah

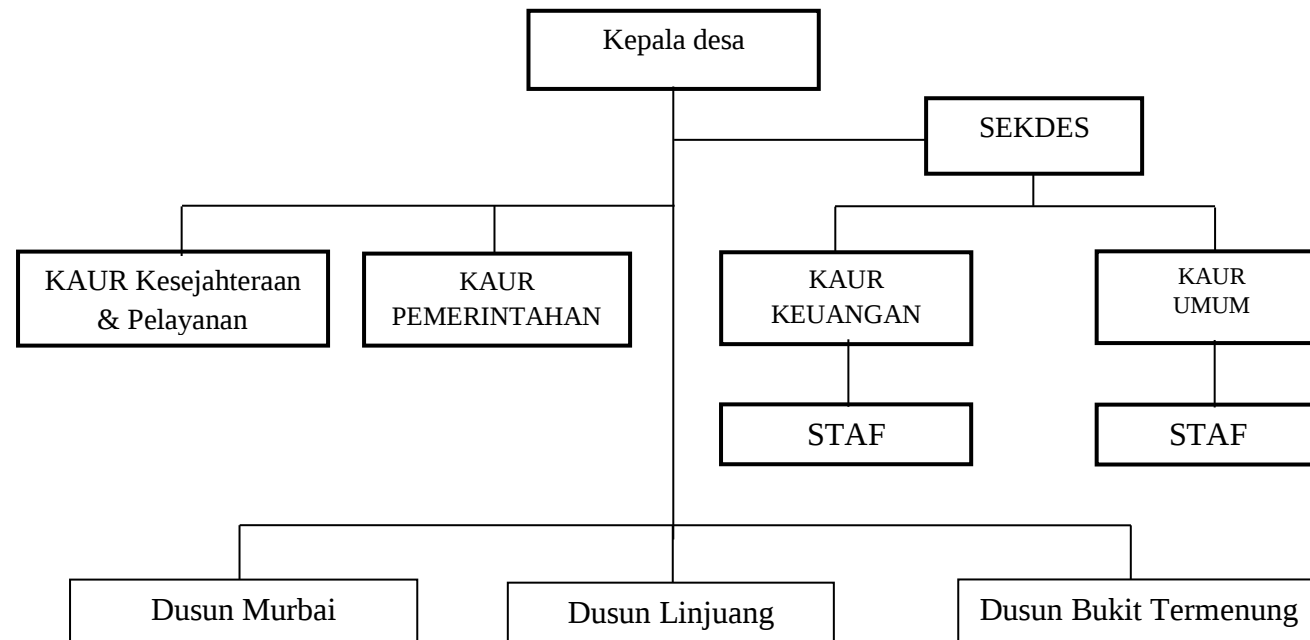
No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	1 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		2

Sumber : Data Desa Jaya Kopah 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Jaya Kopah terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

4.2.6 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Jaya Kopah Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Des

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 60 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapat jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	37	62%
2	Perempuan	23	38%
Jumlah		60	100

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 60 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 37 orang dengan persentase 62%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 23 orang dengan persentase 38%, mayoritas responden adalah laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	22	37%
2	31 – 40	18	30%
3	41 – 50	13	22%
4	> 51	7	12%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur di bawah 30 tahun yaitu sebanyak 22 orang (37%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 18 orang (30%), antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 13 orang (22%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 7 orang (12%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia bawah 30 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	9	15%
2	Wiraswasta	26	43%
3	Petani	14	23%
4	Lainnya	11	18%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 9 orang (15%), wiraswasta sebanyak 26 orang (43%), Petani sebanyak 14 orang (23%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (18%).

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	4	7%
2	SLTA	36	60%
3	Diploma	5	8%
4	Strata I	15	25%
5	Strata II	-	-
Jumlah		60	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (7%), tingkat SLTA sebanyak 36 orang (60%), Diploma sebanyak 5 orang (8%), dan Strata I sebanyak 15 orang (25%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

000 - 60	= Tidak Baik
61 - 120	= Kurang Baik
121 - 180	= Cukup Baik
181 - 240	= Baik
241 - 300	= Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturandes bersama kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

5.2.1.1 BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	4	16	7%
	Cukup Baik	3	2	6	3%
	Kurang Baik	2	37	74	62%
	Tidak Baik	1	16	16	27%
Jumlah			60	117	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (3%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 37 responden (62%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (27%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 117 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilaporkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa.

5.2.1.2 Koordinasi BPD dengan aparat Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Koordinasi BPD dengan aparat Desa, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	4	16	7%
	Cukup Baik	3	3	9	5%
	Kurang Baik	2	22	44	37%
	Tidak Baik	1	30	30	50%
Jumlah			60	104	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 22 responden (37%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 30 responden (50%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 104 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 104 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Koordinasi Badan Permusyawaratan

Desa dengan aparat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti Badan Permusyawaratan Desa mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa, menyepakati rancangan peraturan yang sudah dibuat tanpa ada apapun yang menjadi masukan untuk peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

5.2.1.3 Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan di Desa Jaya

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan BPD bersama kepala Desa dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden mengenai Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	3	12	5%
	Cukup Baik	3	3	9	5%
	Kurang Baik	2	24	48	40%
	Tidak Baik	1	29	29	48%
Jumlah			60	103	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 24 responden (40%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 29 responden (48%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 103 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil

peraturan yang ditetapkan pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 103. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis diharapkan bahwa memang Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota BPD, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang ditetapkan kepala desa.

5.2.1.4 Rekapitulasi Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa pada tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa?	1	4	2	37	16	60	117

Lanjutan Tabel 5.8

2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tugas dan fungsinya?	1	4	3	22	30	60	104
3	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan BPD bersama kepala Desa?	1	3	3	24	29	60	103
Jumlah		3	11	8	83	75	180	108
Jumlah Responden		1	4	3	28	25	60	
Persentase (%)		2	6	4	46	42	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (6%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (4%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 28 responden (46%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 25 responden (42%). Maka secara rata-rata adalah 108 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa adalah Kurang Baik.

Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang

dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa, Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti Badan Permusyawaratan Desa mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa, menyepakati rancangan peraturan yang sudah dibuat tanpa ada apapun yang menjadi masukan untuk peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan kepala desa.

5.2.2 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Instrumen pertanyaan untuk indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

5.2.2.1 Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan responden mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	3%
	Baik	4	3	12	5%
	Cukup Baik	3	2	6	3%
	Kurang Baik	2	37	74	62%
	Tidak Baik	1	16	16	27%
Jumlah			60	118	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 2 responden (3%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 37 responden (62%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (27%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis

dilapangan bahwa memang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan Badan Permasyarakatan Desa terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa, Badan Permasyarakatan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsi nya sebagai Badan Permasyarakatan Desa.

5.2.2.2 Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden mengenai Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	3	15	5%
	Baik	4	2	8	3%
	Cukup Baik	3	3	9	5%
	Kurang Baik	2	30	60	50%
	Tidak Baik	1	22	22	37%
Jumlah			60	114	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 2 responden

(3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 30 responden (50%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 22 responden (37%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 114 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak tau bdengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa .

5.2.2.3 Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	3	15	5%
	Baik	4	1	4	2%
	Cukup Baik	3	4	12	7%
	Kurang Baik	2	36	72	60%
	Tidak Baik	1	16	16	27%
Jumlah			60	119	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 36 responden (60%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16 responden (27%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 119 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 119 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja.

5.2.2.4 Rekapitulasi Indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Kategori					Jumla	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	STB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	2	3	2	37	16	60	118
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.	3	2	3	30	22	60	114
3	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat	3	1	4	36	16	60	119
Jumlah		8	6	9	103	54	180	117
Jumlah Responden		3	2	3	34	18	60	
Persentase (%)		4	3	5	57	30	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 3 responden (4%), menjawab Baik sebanyak 2 responden (3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 34 responden

(57%), dan yang menjawab Tidak baik sebanyak 18 responden (30%). Maka secara rata-rata adalah 117 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah adalah Kurang Baik.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsi nya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak tau bdengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, memang Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja.

5.2.3 Indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Instrumen pertanyaan untuk indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

5.2.3.1 BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Jaya

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut :

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden tentang BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	3%
	Baik	4	3	12	5%
	Cukup Baik	3	3	9	5%
	Kurang Baik	2	34	68	57%
	Tidak Baik	1	18	18	30%
Jumlah			60	117	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 34 responden (57%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (30%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang

berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilaporkan bahwa memang Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan kurang paham nya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5.2.3.2 BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD dalam mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden mengenai BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	4	16	7%
	Cukup Baik	3	3	9	5%
	Kurang Baik	2	36	72	60%
	Tidak Baik	1	16	16	27%
Jumlah			60	118	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), menjawab Baik sebanyak 4 responden (7%), menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), menjawab Kurang Baik sebanyak 36 responden (60%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 16

responden (27%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa anggota BPD yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai BPD, yang membuat BPD tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

5.2.3.3 Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Jaya

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa, dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa, dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini :

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden mengenai Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	2	10	3%
	Baik	4	2	8	3%
	Cukup Baik	3	4	12	7%
	Kurang Baik	2	34	68	57%
	Tidak Baik	1	18	18	30%
Jumlah			60	116	100

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 2 responden (3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 4 responden (7%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 34 responden (57%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 18 responden (30%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Desa Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun menurutnya kinerja Kepala Desa Jaya Kopah baik dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan BPD tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja BPD ini.

5.2.3.4 Rekapitulasi Indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa pada tabel 5.16 di bawah ini

Tabel 5.16: Rekapitulasi tanggapan responden terhadap BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?	2	3	3	34	18	60	117
2	Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa?	1	4	3	36	16	60	118
3	Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa?	2	2	4	34	18	60	116
Jumlah		5	9	10	104	52	180	117
Jumlah Responden		2	3	3	35	17	60	
Persentase (%)		3	5	6	58	29	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (6%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 35 responden (58%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 17 responden (29%). Maka didapat rata-rata jumlah total adalah 117 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang baik. terlihat dengan kurang paham nya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa mengetahui

funksinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Desa Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun menurutnya kinerja Kepala Desa Jaya Kopah baik dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini.

5.3 Rekapitulasi keseluruhan Indikator Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.17 di bawah ini :

Tabel 5.17 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori					Jumlah responden	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturandesa bersama kepala Desa	1	4	3	28	25	60	108
2.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	3	2	3	34	18	60	117
3.	Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa	2	3	3	35	17	60	117
Jumlah		6	9	9	97	60	180	114
Jumlah Responden		2	3	3	32	20	60	
Persentase (%)		3	5	5	54	33	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.29 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah Sangat Baik sebanyak 2 responden (3%), menjawab Baik sebanyak 13 responden (5%),

yang menjawab Cukup Baik sebanyak 3 responden (5%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 32 responden (54%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 20 responden (33%). Maka secara rata-rata adalah 114 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Kurang Baik yang berada pada skala 61 - 120. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan keseluruhannya Kurang Baik.

5.3.1 Analisis penelitian

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner yaitu :

5.3.1.1 Indikator BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturandes bersama kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 117 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa Kurang baik yang berada pada Interval 61 – 120.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan

Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa.

2. Koordinasi BPD dengan aparat Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 104 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, tidak terlalu aktif, seperti BPD mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa.

3. Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 103 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120..

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota BPD, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan kepala desa

5.3.1.2 Indikator BPD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan BPD terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar

tersampaikan oleh BPD, BPD terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsi nya sebagai BPD.

2. Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah kurang baik, BPD tidak aktif, seperti tidak tau bdengan tugas dan fungsinya sebagai BPD

3. Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 119 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Jaya Kopah memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja.

5.3.1.3 Indikator BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 117 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah kurang baik, terlihat dengan kurang paham nya anggota BPD dengan tugas dan fungsinya, sehingga BPD tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 118 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang BPD mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa anggota

BPD yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai BPD, yang membuat BPD tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah pada kategori Kurang baik yang berada pada Interval 61 - 120.

Berdasarkan observasi penulis bahwa memang Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Desa Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun menurutnya kinerja Kepala Desa Jaya Kopah baik dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan BPD tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja BPD ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan memang kurang maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa Jaya Kopah melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang menghasilkan nilai rata-rata 114 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa benar-benar melaksanakan tugas da fungsinya.
2. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
3. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
4. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas fungsinya untuk Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka
- Edison, Emron, dkk, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, cv. Bandung.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Sondang P. Siagian, 2001. *Administrasi Pembangunan konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama

Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja. 1993. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG

Judul : Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi Periode 2014 – 2019

A. Identitas Peneliti

Nama : MARDIANTONI
NPM : 160411065
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. KETENTUAN

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari /
mendapatkan data – data penelitian mengenai Evaluasi Tugas dan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, dalam angket ini akan sangat dijaga
kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.

3. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.
4. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling benar. Dengan kriteria pilihan jawaban sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

DAFTAR PERTANYAAN :

A. BPD Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Koordinasi BPD dengan aparat Desa Jaya Kopah dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan BPD bersama kepala Desa ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kinerja BPD dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

C. BPD Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM.07 Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARDIANTONI
 NPM : 160411065
 Pembimbing I : ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
 Pembimbing II : SAHRI MUHARRAM, S.Sos, M.Si
 Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014 – 2019

No.	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	19/03/2020	- penyusunan - kesimpulan		
2	14/05/2020	Acc		
3		- Lengkapi bab IV - Analisis Penelitian		
4		- hasil penelitian di perbaikan		
5		- Lengkapi Skripsi		
6	14/05/2020	Acc		
7				
8				



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA JAYA**

Alamat : Jl. ADD-PID Dusun Murbai

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 232/SKP-DJ/VI/2020
Lampiran : -
Sifat : biasa

Kepala Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Menyatakan bahwa :

1. Nama : **MARDIANTONI**
2. Alamat : **Titian modang Kopah**
3. Pekerjaan : **MAHASISWA**
: Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Skripsi/Tesis/Desertasi/Tugas akhir, dsb *) di kantor Desa Jaya Kecamatan kuantan tengah Kabupaten Kuantan singingi.
4. Judul Usulan Penelitian : **Evaluasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019**
5. Lokasi Penelitian : **Kantor Desa Jaya Kopah**
6. Waktu Penelitian : **3 (TIGA) BULAN**
7. Status penelitian : **Baru / Perpanjangan**
8. Nama Lembaga : **FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

Benar adanya bahwa MARDIANTONI Melakukan Penelitian di Kantor Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Jaya
Pada tanggal : 10 Juni 2020
Kepala Desa Jaya,

MATNUR



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 06 Maret 2020

Nomor : 130/FIS/UNIKS/III/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Permohonan Pelaksanaan
 Riset

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Desa Jaya Kopah
 Kabupaten Kuantan Singingi
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mardiantoni
 NPM : 160411065
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2019
 Lokasi Penelitian : Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar berkenan kiranya memberi izin penelitian dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

ZUL AMMAR, SE., ME
 NIDN. 1020088401

DOKUMENTASI





